

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam serta memiliki budaya yang sangat beragam. Pemanfaatan sumber daya alam dan budaya tersebut dapat menjamin perkembangan perekonomian Indonesia. Kenyataannya, kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah utama yang dihadapi bangsa ini sehingga dapat menjadi penghambat perkembangan perekonomian Indonesia.

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mengembangkan perekonomian Indonesia pada sektor bisnis. Salah satu bidang bisnis di Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM sebagai salah satu kegiatan usaha mampu memperluas lapangan kerja, menekan angka pengangguran sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. UMKM dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro kecil menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah. Dalam carut-marut situasi dan kondisi ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir yang belum stabil dan kondusif ini, pengembangan kegiatan UMKM dianggap sebagai salah satu alternatif penting yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Dalam kajian yang disampaikan oleh Bank Indonesia menjelaskan bahwa ada tiga indikator yang menunjukkan

peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia. Pertama, jumlah industrinya banyak dan ada dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, mempunyai kemampuan besar dalam menyerap tenaga kerja. Ketiga, memberikan kontribusi bagi pendapatan nasional. Hal ini dapat diartikan UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan PDB bangsa.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64 juta (Liputan6.com). Angka tersebut mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Tahun 2020 UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada. Dengan rincian, usaha mikro sebanyak 89,2%, usaha kecil sebanyak 4,47%, dan usaha menengah sebanyak 3%. Ini dibuktikan Pada tahun 2021 UMKM menyumbang pertumbuhan ekonomi hingga 61,07 persen PDB. (sumber: indonesia.go.id diakses tanggal 14 April 2022).

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) masih menjadi andalan dalam mendorong perekonomian di Indonesia salah satunya di Maluku, dengan unit usaha mulai dari sektor perdagangan, pertanian, perikanan, perindustrian dan lain-lain, sehingga eksistensi UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM mampu mengatasi persoalan mendasar dalam perekonomian Maluku, yakni pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu pengembangan sektor UMKM perlu mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, legislatif, pelaku usaha, perguruan tinggi termasuk perbankan.

UMKM di Maluku yang terdata sebesar 58.483 pelaku usaha pada tahun 2022. UMKM akan dipersiapkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku, rincian UMKM di Maluku antara lain 26.793 di kota Ambon, Maluku Tengah sebanyak 19.418 dan Kota Tual sebanyak 12.272. (sumber: LaskarMaluku.com diakses tanggal 14 April 2022)

Kendala yang dihadapi para pelaku UMKM di maluku yaitu dalam hal pendanaan yang belum optimal, hal ini disebabkan karena minimnya informasi yang diterima oleh pihak UMKM sehingga pelaku usaha kecil banyak yang tidak mengetahui prosedur maupun persyaratan pengajuan pinjaman bank dan

tidak adanya layanan kredit mikro, hal ini menyebabkan banyak UMKM yang tidak bisa berkembang, selain itu dalam hal sumber daya manusia (SDM) juga masih kurang, banyak pelaku usaha di daerah pedesaan yang masih minim pemahaman tentang bagaimana mengembangkan usahanya.

Pekerjaan rumah yang harus dituntaskan adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah sektor ini secara optimal, dengan demikian akan mampu memberikan daya ungkit yang lebih besar dalam memajukan perekonomian di Maluku. Dari aspek pembiayaan perbankan memainkan peran penting untuk menyalurkan kredit dan bukan hanya kepada UMKM yang bergerak di sektor perdagangan semata namun juga membiayai UMKM di sektor industri pengolahan termasuk di sektor pertanian serta kelautan dan perikanan. Proses intermediasi perbankan dalam berbagai sektor akan terus ditingkatkan agar sumber daya keuangan yang tersedia di perbankan dapat dimanfaatkan para pengusaha UMKM dengan optimal. Dalam hal ini Bank Indonesia akan tetap konsisten menjalankan berbagai program bantuan teknis guna mengembangkan UMKM, program kerja yang dilakukan Bank Indonesia antara lain memberikan pelatihan kepada UMKM, sosialisasi kredit usaha rakyat kepada UMKM calon debitur.

Beberapa upaya juga sudah dilakukan untuk mengembangkan dan memajukan UMKM di Maluku salah satunya yaitu melalui kerjasama antara Sahabat UMKM dengan Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Tengah dengan Program pengembangan UMKM di Maluku Tengah. Kerjasama dengan Sahabat UMKM merupakan sesuatu hal yang sangat menggembirakan, karena pelaku usaha mikro di Maluku mendapatkan perhatian, khususnya Maluku Tengah, dengan mengadakan salah satu program pengembangan sumber daya manusia (SDM). Saat ini pelaku usaha mikro yang ada di Maluku Tengah berjumlah sekitar 19.418. Melalui kerja sama antara Diskop UKM Kabupaten Maluku Tengah dengan Sahabat UMKM dapat memajukan pelaku usaha mikro setempat, sehingga produk UMKM Maluku Tengah dapat dipasarkan secara nasional.

Setiap UMKM menjalankan aktivitas penerimaan kas yang merupakan aktivitas dari transaksi keuangan yang menyebabkan aset perusahaan berupa kas

atau setara kas bertambah. Sumber penerimaan kas berasal dari transaksi penjualan baik penjualan tunai maupun penjualan kredit. Menurut Mulyadi (2016: 379), sumber penerimaan kas terbesar suatu perusahaan dagang berasal dari transaksi penjualan tunai. Risiko kecurangan penerimaan kas pada suatu perusahaan berskala kecil seperti UMKM lebih sering terjadi apabila dibandingkan dengan risiko kecurangan penerimaan kas yang terjadi pada perusahaan yang telah go public. Laundry Griya Cuci salah satu UMKM di Maluku memiliki Sistem Pengendalian Internal yang perlu dievaluasi untuk mencegah terjadinya tindakan penggelapan uang kas oleh karyawan yang telah terjadi pada bulan Mei 2019. Evaluasi pertama adalah pada aspek organisasi dengan melakukan pembagian tugas dan jadwal antara pemilik dan satu orang karyawan yang telah ditunjuk sebagai perwakilan pemilik dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penerimaan kas dan tugas lainnya yang berdampak. Pada aspek Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan telah dilakukan sesuai standar SPI Penerimaan kas sedangkan pada aspek praktik yang sehat seharusnya faktur penjualan atau kuitansi penerimaan kas harus bernomor urut cetak agar alur penggelapan uang kas dapat ditelusuri dan terlacak. (Latuconsina, 2019)

Penelitian pengendalian intern sistem penerimaan kas secara tunai yang telah dilakukan oleh (Zulvinia Nur Salasa M. S., 2016) di PG. Kebon Agung Malang. Hasil penelitiannya menunjukkan sistem pengendalian internal sudah cukup baik. Namun masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki dan dipertimbangkan untuk mendukung pengendalian intern yang baik, yaitu pada sistem akuntansi penerimaan kas melalui pelunasan piutang tidak ada fungsi penagihan, serta dokumen bukti kas masuk dan bukti kas keluar tidak dibuat rangkap dua selanjutnya tidak terdapat suatu bagian sebagai staf audit intern yang melakukan pemeriksaan terhadap sistem dan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.

(Caecilia Anita Setiyani, 2017) melakukan analisis pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas pada Gereja-gereja di Rayon Bantul dengan Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki (PTKAP) dan Pedoman Keuangan dan Akuntansi Paroki (PKAP) dapat diketahui terdapat beberapa hal yang

berkaitan dengan unsur pengendalian intern yang tidak sesuai dengan teori yang terdapat pada PTKAP dan PKAP, tetapi telah disesuaikan dengan kondisi yang ada dari masing-masing gereja. Ketidaksesuaian tersebut, antara lain: Adanya pemisahan fungsi yang belum dilakukan secara tegas, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pada masing-masing gereja di Rayon Bantul yang belum sepenuhnya sesuai dengan PTKAP, karena ada beberapa dokumen pencatatan yang tidak selalu terdapat tanda tangan yang lengkap dari pejabat yang berwenang dan tidak semua bukti pengeluaran disertai dengan bukti dengan nomor urut yang tercetak.

Pengeluaran kas adalah kas atau uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan. Pengeluaran kas di perusahaan terdiri dari pembelian dan penggajian atau pengupahan. Mulyadi (2016). Ada beberapa aspek kelemahan yang perlu diperbaiki para pelaku UMKM yaitu 1) Integritas dan nilai etika para pelaku UMKM yang tidak ada menyusun kode etik pada penerimaan kas dan pengeluaran kas. 2) Struktur Organisasi para pelaku UMKM yang tidak ada memiliki struktur organisasi dalam menjalankan usahanya pada penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam hal ini para pemilik usaha hanya cenderung sendiri dan tidak ada dalam pembagian organisasi dalam menjalankan usahanya. 3) Penaksiran Resiko sering dilakukan oleh para pemilik UMKM pada penerimaan dan pengeluaran kas tapi ada beberapa catatan dalam penaksiran resiko pada para pemilik UMKM dalam menjalankan usahanya belum ada dokumen hal yang berisi mengenai pernyataan dan arahan yang spesifik, dapat dicapai, realistis yang berhubungan dengan penaksiran resiko. 4) Informasi dan komunikasi pada penerimaan kas para pemilik UMKM tidak ada pengendalian yang dilakukannya sedangkan pada pengeluaran kas hanya komunikasi yg perlu diperhatikan oleh Pemilik (Hardi Bahar*, 2018).

Penelitian oleh Taufiq Qurrahman (2014) mengambil objek dari organisasi bisnis yang memiliki *tendensi* pendekatan pada profit oriented yaitu PT Dasar Utama yang bergerak dalam komoditas wood working (tukang kayu). Dengan pendekatan penelitian kualitatif, penelitiannya hendak menginvestigasi efektivitas sistem pengendalian internal pengeluaran kas yang dipakai perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di PT

Dasar Utama belum berjalan sebagaimana mestinya hingga mengakibatkan sistem tersebut belum efektif

Oleh karena itu, setiap UMKM membutuhkan pengendalian internal pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas agar UMKM dapat mengamankan harta kekayaan UMKM yang menjadi salah satu penjamin keberlangsungan UMKM pada masa yang akan datang. Menurut Hery (2014:11) Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan, penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Menurut Ocktariani (2017: 2-3), “Pengendalian internal bertujuan untuk menjamin perusahaan agar tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat dicapai, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya dan kegiatan perusahaan sejalan dengan peraturan dan hukum yang berlaku”.

Pengendalian intern merupakan suatu tehnik pengawasan yaitu pengawasan secara keseluruhan dari aktivitas perusahaan, baik mengenai organisasi perusahaan maupun sistem yang digunakan untuk menjalankan perusahaan tersebut dan tidak terkecuali alat-alat yang digunakan oleh perusahaan. Pengendalian intern tidak hanya memeriksa kebenaran angka-angka 2 dan melindungi harta kekayaan perusahaan dari segi pembukuan saja tetapi juga memperhatikan struktur organisasi perusahaan, meningkatkan efisiensi kerja dan menganalisis keberhasilan dari suatu kebijakan manajemen. Oleh karena itu pengendalian intern harus dimonitor dan dievaluasi agar manfaat dari pengendalian intern tersebut berdaya dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan (Lumbangaol, 2019)

Penerapan pengendalian intern pada suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila pengendalian tersebut selalu berpedoman pada suatu pengendalian intern yang baik sehat dimana pengendalian tersebut tidak menjadi beban sehingga memperlambat pencapaian tujuan perusahaan tetapi justru pengendalian tersebut harus menjadi alat bantu bagi manajemen dalam

rangka mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Dengan demikian maka pengendalian adalah sifatnya menyeluruh terhadap semua komponen yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan (Lumbangaol, 2019)

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi terutama dalam pemanfaatan teknologi komputer untuk pengolahan data juga menjadi perhatian di perusahaan besar. Berbagai kegiatan perusahaan bisa dikembangkan menjadi sistem yang kinerjanya menggunakan perangkat komputer, seperti pengolahan data penjualan barang, pembelian barang dari vendor, serta pengelolaan data barang di gudang (Cahyodi & Arifin, 2017).

Kebutuhan informasi oleh pelaku bisnis yang berharap bisnisnya dapat terus berkembang tentunya harus diimbangi dengan kemampuan teknologi yang memadai. Agar dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan, dengan informasi yang memadai dan penyajian yang tidak sebatas gambar dan teks saja. Untuk itulah dirancang *Point of sales* (POS) suatu sistem layanan penjualan yang terkomputerisasi untuk mempermudah perusahaan dalam mengelola pelanggannya, sekaligus mendukung kegiatan point of sales dan penyetoran barang (Permana & Faisal, 2017).

Pengertian dari *point of sale* (POS) merupakan kegiatan yang berorientasi pada penjualan serta sistem yang membantu proses transaksi. Point of sales (POS) sangat penting di dunia bisnis karena point of sales (POS) merupakan tempat menerima pembayaran dari pembeli kepada penjual dimana pembayaran tersebut merupakan indikator bagi pebisnis untuk mengukur tingkat pendapatan bisnis mereka (Permana & Faisal, 2015).

Point of sales (POS) mendukung pemilik bisnis untuk berkembang. Dengan *point of sales* (POS), pebisnis dapat menghitung stok dan harga pokok barang secara otomatis, sehingga tidak perlu menghitung manual. Aplikasi POS dapat digunakan sebagai pengendalian dalam mengurangi kecurangan dan mengurasi resiko kesalahan seperti:

- a. Penjualan yang tidak terdokumentasi dengan baik
- b. Tidak adanya data barang dan stok
- c. Hilangnya uang kas

UMKM yang sedang berkembang saat ini adalah UMKM Umeputty dan UMKM Puttylesi. Kedua UMKM ini memiliki latar belakang usaha yang sama yaitu merupakan kelompok mandiri wanita yang tergabung dalam proyek SOLID (*smallholder livelihood devolement*) atau peningkatan kesejahteraan petani kecil Maluku Tengah, serta memiliki struktur organisasi, data dokumen-dokumen transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang hampir sama. Penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengevaluasi penerapan pengendalian internal pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas usaha, mikro kecil dan menengah (umkm).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud mengambil judul “EVALUASI PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA SISTEM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS USAHA, MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (STUDI KASUS UMKM UMEPUTTY DAN UMKM PUTTYLESI)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pengendalian internal pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada UMKM Umeputty dan UMKM Puttylesi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan pengendalian internal pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada UMKM Umeputty dan UMKM Puttylesi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai evaluasi penerapan pengendalian internal pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada UMKM. Diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi pustaka pada perpustakaan.

- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang evaluasi penerapan pengendalian internal pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada UMKM.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Bagian keuangan UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna terkait dengan penerapan pengendalian internal.

- b. Bagi Manager UMKM

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan dasar pemikiran untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal pada UMKM.

- c. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Tengah

Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi terkait dengan pengendalian internal pada UMKM agar dapat memperbaiki atau meningkatkan pengendalian internal dalam UMKM.

